

**Implementasi Gerakan Kesejahteraan Sosial
sebagai Model Praktik Makro Pekerjaan Sosial:
Studi pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Malang**

**Implementation of Social Welfare Movement
as a Macro Social Work Practice Model:
A Study on the Muhammadiyah Organization in Malang City**

Oman Sukmana,¹ Juli Astutik,² & Budi Suprpto³

¹oman@umm.ac.id (corresponding author)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Indonesia

²astutik@umm.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Indonesia

³budisuprpto@umm.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Indonesia

Received: September 8, 2022 | Revised: April 19, 2024 | Published: December 31, 2024

Abstract: Efforts to achieve social welfare must be organized through social welfare movements by encouraging the participation of communities and social organizations. This study examines the implementation and processes of the social welfare movement conducted by Persyarikatan Muhammadiyah in Malang City, East Java, as a model of macro social work practice. Using a qualitative method with a case study approach, the research involved four administrators of the Muhammadiyah Regional Leadership in Malang City, selected purposively as subjects. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the implementation of the social welfare movement is influenced by organizational factors, leadership, resources, networks, community participation, strategies, and movement objectives. Persyarikatan Muhammadiyah has effectively provided social services, education, healthcare, and community empowerment to address various social issues. This study recommends that the government develop social welfare movement programs involving collaboration with community organizations, provide accurate data on social welfare organizations as strategic partners, and ensure, through Commission VIII of the Indonesian Parliament (DPR RI), that social welfare programs are implemented systematically, effectively, and efficiently. Furthermore, formal regulations should guarantee the active involvement of community organizations in the development of social welfare programs.

Keywords: macro practices; Muhammadiyah; social welfare movement; social work



Abstrak: Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara terorganisir melalui gerakan kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi sosial. Penelitian ini menggambarkan implementasi dan proses gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai model praktik makro pekerjaan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan empat pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang dipilih secara *purposive* sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gerakan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh faktor organisasi, kepemimpinan, sumber daya, jaringan, partisipasi masyarakat, strategi, dan tujuan gerakan. Persyarikatan Muhammadiyah telah berhasil memberikan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun program gerakan kesejahteraan sosial yang melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, menyediakan data yang akurat terkait organisasi gerakan kesejahteraan sosial sebagai mitra strategis, serta memastikan, melalui Komisi VIII DPR RI, bahwa program kesejahteraan sosial dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien. Selain itu, perlu ada regulasi formal yang menjamin keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan program kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: gerakan kesejahteraan sosial; pekerjaan sosial; Persyarikatan Muhammadiyah; praktik makro

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam upaya mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial maka diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, serta masyarakat.

Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini tampaknya belum berjalan secara sistematis dan terorganisir, serta terkesan masih bersifat aksi sosial yang sifatnya sporadis dan responsif atas dasar kasuistik. Oleh karena itu, gerakan kesejahteraan sosial diperlukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Konsep gerakan kesejahteraan sosial secara umum mengacu kepada konsep gerakan sosial yang diimplementasikan dalam tujuan untuk memberikan layanan sosial dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing. Peran serta masyarakat ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis Islam, telah melakukan gerakan kesejahteraan sosial dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyediaan layanan dan bantuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bagaimana organisasi kemasyarakatan (ormas) berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Misalnya, hasil penelitian Mulyadi (2012) menunjukkan Dompot Dhuafa sebagai salah satu ormas yang telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Hasil penelitian Rahman *et al.* (2023) menunjukkan bahwa ormas dan LSM memiliki potensi besar dalam memobilisasi masyarakat, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan memberikan layanan yang diperlukan bagi warga masyarakat. Namun, menurut Surya (2024) peran ormas dalam proses pembangunan sosial belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian mengenai implementasi gerakan kesejahteraan sosial oleh organisasi kemasyarakatan di Indonesia, khususnya oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Malang. Meskipun terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengeksplorasi peran organisasi masyarakat (ormas) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagian besar fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, tanpa memberikan analisis yang mendalam mengenai implementasi gerakan kesejahteraan sosial secara terorganisir sebagai model praktik makro pekerjaan sosial.

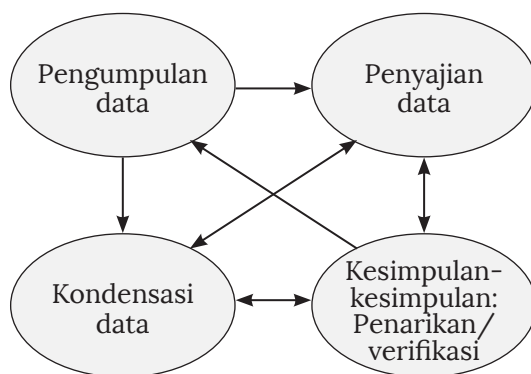
Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial perlu diselenggarakan secara komprehensif, terencana, dan terorganisir dalam bentuk gerakan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi dan proses gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Malang, Jawa Timur sebagai model praktik makro pekerjaan sosial?”

Penelitian ini sangat penting bagi DPR RI, khususnya Komisi VIII, karena memberikan wawasan mendalam mengenai peran dan kontribusi organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Persyarikatan Muhammadiyah, dalam menjalankan gerakan kesejahteraan sosial yang terorganisir dan berkelanjutan. Dengan memahami implementasi dan proses gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Komisi VIII dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong regulasi yang mendukung keterlibatan aktif ormas dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga dapat memperkuat argumentasi bagi DPR RI untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-konstruktivisme (*constructivism-interpretive*), pendekatan dan jenis penelitian kualitatif (Denzin & Lincoln, 2009). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Denzin & Lincoln, 2009; Marvasti, 2004), dan jenis penelitian studi kasus. *Setting* (lokasi) penelitian ditentukan di wilayah Kota Malang, yakni pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang. Dalam penelitian ini, teknik *purposive* atau *judgement* digunakan

untuk menentukan subjek dan informan sebagai sumber data penelitian (Babbie, 2008; Neuman, 2007), yakni, ketua, sekretaris, dan pengurus Majelis Pelayanan Sosial PDM Kota Malang, serta intelektual Muhammadiyah. Jumlah subjek dan informan sebanyak empat orang. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan tiga teknik utama yang saling mendukung, yakni observasi, *interview*, dan *documentation*. Oleh karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, maka untuk melakukan analisis data menerapkan pendekatan interpretif (*interpretive approach*).

Teknik analisis data penelitian mendasarkan pada teknik data kualitatif. Tahap-tahap proses analisis data kualitatif mengacu kepada pendapat Miles *et al.* (2014), yakni pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), kondensasi data (*data condensation*); dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Keempat proses analisis data tersebut merupakan proses simultan dan interaktif yang digambarkan pada Bagan 1.



Bagan 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles *et al.* (2014).

Dalam menentukan keabsahan data, selanjutnya peneliti menerapkan kriteria kredibilitas (*credibility*) dan konfirmabilitas (*confirmability*). Implementasi teknik kredibilitas (*credibility*) dalam penelitian ini adalah dalam bentuk perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan kecukupan referensial. Sementara implementasi teknik konfirmabilitas (*confirmability*) adalah berupa teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran (Moleong, 2007).

Langkah pertama, proses pengumpulan data menggunakan tiga metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu: (1) wawancara, yang dilakukan untuk mendapatkan data-data langsung dari subjek penelitian; (2) observasi (*observation*), yang dilakukan untuk mengamati beberapa situasi dan kondisi di lapangan; dan (3) dokumentasi (*documentation*), yakni melakukan analisis data dari sumber-sumber sekunder. Langkah kedua, kondensasi data yakni melakukan pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Langkah ketiga, penyajian data menggunakan tabel dan uraian deskriptif. Langkah terakhir, melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni setelah data dianalisis maka kemudian disimpulkan dan diverifikasi dengan mengacu kepada konsep-konsep yang relevan.

Gerakan Kesejahteraan Sosial sebagai Model Praktik Makro Pekerjaan Sosial

Dalam sosiologi, konsep aksi sosial sering kali dikaitkan dengan perilaku kolektif (*collective behavior*), aksi kolektif (*collective action*), dan gerakan sosial (*social movements*). Perilaku kolektif merupakan tindakan sekelompok orang yang bersifat sementara, spontan, dan tidak terorganisir. Macionis (2012) menyatakan, dalam perilaku kolektif, tidak terjadi interaksi sosial di antara mereka yang terlibat. Sebaliknya, gerakan sosial adalah aksi kolektif yang terorganisir, terencana, dan bertujuan untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat.

Gerakan sosial dalam pekerjaan sosial makro berfungsi sebagai salah satu model intervensi sosial. Austin *et al.* (2016) menyebutkan bahwa praktik makro dalam pekerjaan sosial telah berkembang selama lebih dari lima dekade, berfokus pada praktik komunitas, manajemen, dan kebijakan. Pada abad ke-21, pendekatan ini berkembang melalui organisasi akar rumput (*grassroots*) untuk mendukung aksi sosial dan gerakan sosial.

Gerakan kesejahteraan sosial adalah bentuk gerakan sosial yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pada abad ke-19, organisasi seperti Charity Organization Society (COS) di Amerika Serikat telah memprakarsai gerakan ini untuk memperbaiki kondisi masyarakat pasca-krisis ekonomi (Brieland *et al.*, 1975).

Dalam konteks pekerjaan sosial, gerakan kesejahteraan sosial merupakan model intervensi makro yang bertujuan untuk redistribusi kekuasaan dan sumber daya, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Macionis, 2012). Sukmana (2016) menjelaskan, keberhasilan gerakan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh organisasi, kepemimpinan, mobilisasi sumber daya, jaringan, partisipasi masyarakat, strategi, dan tujuan gerakan.

Peran Pekerja Sosial dalam Gerakan Sosial

Pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial (Astri, 2013). Reisch (2016) menyoroti pentingnya peran pekerja sosial dalam intervensi makro untuk menghadapi kompleksitas masalah sosial. Namun, praktik makro kerap menjadi marginal. Di Amerika, hanya enam persen mahasiswa *master of social work* yang terlibat dalam praktik makro seperti perencanaan komunitas, administrasi, advokasi, dan kebijakan sosial (McBeath, 2016).

Thompson (2002) dan Noble (2015) mengemukakan bahwa pekerja sosial harus terlibat dalam gerakan sosial dan protes untuk memperjuangkan keadilan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan. Gerakan sosial dianggap sebagai tindakan kolektif yang terstruktur dan bertahan lama, dengan ciri-ciri seperti adanya tujuan yang jelas, kepemimpinan, dan kegiatan jangka panjang (Greene, 2002). Freeman (dalam Stolley, 2005) menambahkan bahwa media komunikasi, krisis, dan organisasi yang baik adalah faktor penentu keberhasilan suatu gerakan sosial.

Teori yang sesuai dengan konteks ini adalah teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*). Berdasarkan teori ini, Anthony Oberschall (dalam Locher, 2002), menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap situasi tertentu. Jika dikelola oleh pemimpin yang efektif, ketidakpuasan ini dapat dimobilisasi menjadi gerakan sosial yang kuat. Elemen penting dari teori ini

meliputi organisasi, aktor pemimpin, mobilisasi sumber daya, jaringan partisipasi, dan dukungan masyarakat.

Gambaran Umum PDM Kota Malang

Dalam mengkaji aktivitas dan dinamika Muhammadiyah dapat dilihat dari tiga aspek, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, dan Muhammadiyah sebagai organisasi. Sementara dalam konteks Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, maka terdapat empat kategori, yaitu: (1) Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, yakni bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan pemurnian Islam, yang dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan *as-sunnah ash-shahihah*; (2) Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual, yakni bertujuan untuk mengembalikan ruh intelektual Islam dan membangun peradaban serta pembaharuan Islam terutama dalam arus pemikiran Islam modern; (3) Muhammadiyah sebagai gerakan politik moral, yakni bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik akan tetapi bertujuan untuk menjaga moral dan etika politik; dan (4) Muhammadiyah sebagai gerakan kesejahteraan sosial, yakni bahwa tujuan dari Muhammadiyah adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan dan kebodohan.

Dinyatakan oleh Pdn sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya, aktivitas dan dinamika Muhammadiyah bisa dikaji dari tiga aspek, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, dan Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, dalam konteks Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, maka di dalamnya bisa mencakup, pertama Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, kedua Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual, ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan politik moral, dan keempat Muhammadiyah sebagai gerakan kesejahteraan sosial.” (Wawancara dengan Pdn, intelektual muda Muhammadiyah, 2020)

Secara umum peran Muhammadiyah dalam melakukan gerakan kesejahteraan sosial meliputi: (1) peran sebagai pembaharu; (2) peran sebagai negosiator, Muhammadiyah berada dalam peran sebagai negosiator bagi masyarakat adalah dalam upaya menyampaikan keinginan terhadap pemerintah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sesuai undang-undang dan cita-cita luhur bangsa; (3) peran sebagai fasilitator; (4) peran sebagai komunikator; (5) peran sebagai mediator; (6) peran sebagai advokat; (7) peran sebagai pemberdaya; dan (8) peran sebagai *public speaker*.

Dinyatakan oleh Tbn sebagai berikut:

“Muhammadiyah itu didirikan pada awalnya adalah karena keprihatinannya atas kondisi masyarakat waktu itu, yakni kemiskinan dan kebodohan. Bidang garapan Muhammadiyah bukan hanya soal keagamaan, namun juga menyentuh berbagai bidang sosial-kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Muhammadiyah juga melakukan gerakan kesejahteraan sosial. Peran Muhammadiyah itu sangat luas, sebagai pembaharu, sebagai negosiator, sebagai fasilitator, sebagai komunikator, sebagai mediator, sebagai pembela masyarakat, sebagai pemberdaya, sebagai *public speaker*, dan sebagainya.” (Wawancara dengan Tbn, Wakil Ketua PDM Kota Malang, 2020)

Organisasi Muhammadiyah merupakan bentuk dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Islam yang aktivitasnya adalah melakukan gerakan kesejahteraan sosial. PDM Kota Malang secara organisatoris berada di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, dan secara nasional di bawah tanggung

jawab Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. PDM Kota Malang memiliki lima pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM) dan 57 pimpinan ranting Muhammadiyah (PRM).

Selain membawahi cabang Muhammadiyah di tingkat kecamatan dan ranting Muhammadiyah di tingkat kelurahan, PDM Kota Malang secara organisatoris juga memiliki majelis, lembaga, dan organisasi otonom (ortom). Majelis terdiri dari: (1) majelis tarjih dan tajdid; (2) majelis tablig; (3) majelis pendidikan dasar dan menengah; (4) majelis pendidikan kader; (5) majelis pelayanan sosial; (6) majelis ekonomi dan kewirausahaan; (7) majelis pemberdayaan masyarakat; (8) majelis pembina kesehatan umum; (9) majelis pustaka dan informasi; (10) majelis lingkungan hidup; (11) majelis hukum dan hak asasi manusia; dan (12) majelis wakaf dan kehartabendaan. lembaga terdiri dari: (1) lembaga amal zakat, infak, dan sedekah; (2) lembaga pembina dan pengawasan keuangan; (3) lembaga pengembangan cabang dan ranting; (4) lembaga hikmah dan kebijakan publik; (5) lembaga penanggulangan bencana; dan (6) lembaga seni budaya dan olahraga. Sementara ortom terdiri dari: (1) Aisyiyah; (2) pemuda Muhammadiyah; (3) *nasyiatul Aisyiyah*; (4) ikatan mahasiswa Muhammadiyah; (5) ikatan pelajar Muhammadiyah; (6) *Hizbul wathan*; dan (7) tapak suci.

Dinyatakan oleh AH:

“Secara organisatoris, pengurus PDM Kota Malang berada di bawah koordinasi pengurus PWK Jawa Timur, dan secara nasional di bawah tanggung jawab PP Muhammadiyah. Khusus di lingkungan PDM Kota Malang ini memiliki lima cabang yang ada di setiap kecamatan, dan memiliki 57 pengurus ranting yang ada di setiap kelurahan.” (Wawancara dengan AH, Ketua PDM Kota Malang, 2020)

Sementara itu, amal usaha yang dimiliki oleh PDM Kota Malang meliputi: (1) sekolah dasar (SD); (2) madrasah ibtidaiah/dinia (MI/MD); (3) sekolah menengah pertama (SMP); (4) madrasah sanawiah (MTS); (5) sekolah menengah atas (SMA); (6) sekolah menengah kejuruan (SMK); (7) madrasah aliyah (MA); (8) pondok pesantren; (9) akademi; (10) politeknik, (11) universitas; (12) perguruan tinggi Aisyiyah; (13) sekolah tinggi; (14) rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dll.; (15) panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dll.; (16) panti jompo; (17) rehabilitasi cacat; (18) TK Aisyiyah *bustanul athfal*; (19) sekolah luar biasa (SLB); (20) masjid; (21) musala; dan (22) tanah.

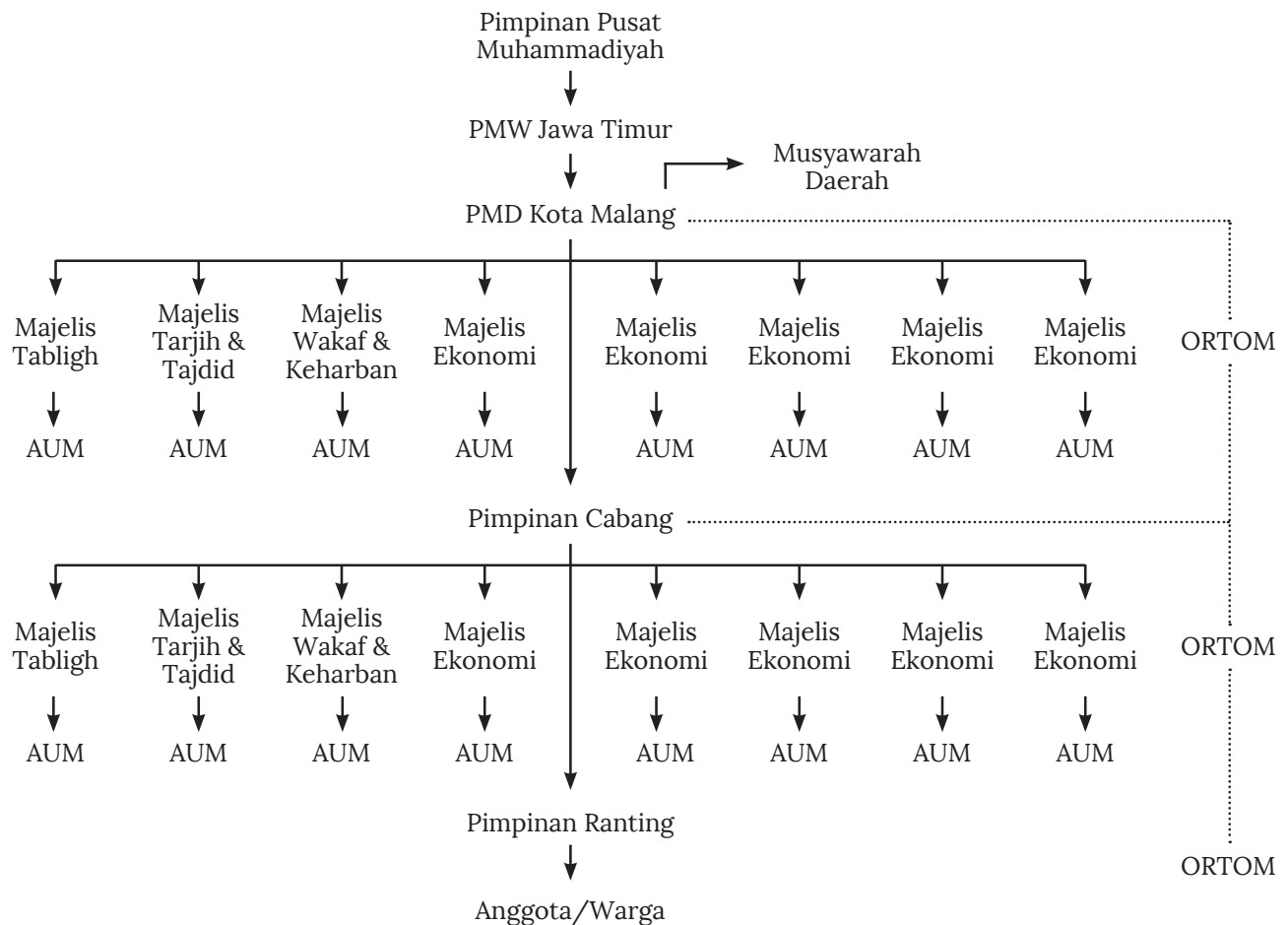
Dinyatakan oleh AH:

“Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan memiliki *concern* dalam upaya memberantas kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya Muhammadiyah bagaimana memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial, dan pelayanan sosial lainnya, termasuk pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan, dan sebagainya.” (Wawancara dengan AH, Ketua PDM Kota Malang, 2020)

Secara struktural, PDM Kota Malang bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah (PMW) Jawa Timur dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Struktur organisasi PDM Kota Malang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan majelis-majelis, serta pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM) dan pimpinan ranting Muhammadiyah (PRM). Majelis yang ada di PDM Kota Malang meliputi: (1) majelis tarjih dan tajdid; (2) majelis tabligh; (3) majelis pendidikan dasar dan menengah; (4) majelis pendidikan kader; (5) majelis pelayanan sosial; (6) majelis ekonomi dan kewirausahaan; (7) majelis pemberdayaan masyarakat; (8) majelis pembina kesehatan umum; (9) majelis pustaka dan informasi; (10) majelis lingkungan hidup; (11) majelis hukum dan hak asasi manusia; dan (12) majelis wakaf dan kehartabendaan. Sementara lembaga yang dimiliki PDM Kota Malang, meliputi: (1) lembaga pengembangan cabang dan ranting; (2) lembaga pembina dan penga-

wasan keuangan; (3) lembaga penanggulangan bencana; (4) lembaga amil zakat, infak, dan sedekah; (5) lembaga hikmah dan kebijakan publik; (6) lembaga seni budaya dan olahraga; (7) lembaga hubungan dan kerja sama internasional; dan (8) lembaga dakwah khusus.

PDM Kota Malang membawahi lima PCM, yakni PCM Blimbing, PCM Kedungkandang, PCM Klojen, PCM Lowokwaru, dan PCM Sukun. Struktur organisasi Kota Malang dapat dilihat di Bagan 2.



Bagan 2. Struktur Organisasi PDM Kota Malang

Implementasi dan Proses Gerakan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Malang

Implementasi gerakan kesejahteraan sosial dalam intervensi makro pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat lokal, yakni yang dilakukan oleh pengurus PDM Kota Malang, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, dimensi organisasi (*organization*). Aspek organisasi adalah hal yang fundamental dalam suatu gerakan sosial (gerakan kesejahteraan sosial) karena pada dasarnya gerakan sosial (gerakan kesejahteraan sosial) adalah tindakan kolektif yang diorganisir. Oleh karena itu, suatu gerakan sosial (gerakan kesejahteraan sosial) tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa ada organisasi sebagai wadah gerakan. PDM Kota Malang secara organisasi dibangun dan tidak bisa dilepaskan dari jenjang organisasi Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Oleh karena itu, secara organisatoris maka dinamika dan proses gerakan kesejahteraan sosial Muhammadiyah didukung oleh organisasi gerakan yang sudah mapan. Organisasi PDM Kota Malang memiliki lima cabang dan 57 ranting.

Dinyatakan oleh Abd sebagai berikut:

“Muhammadiyah itu kalau melakukan kegiatan maka dilakukan secara terprogram dan terorganisir. Oleh karena itu, membangun struktur organisasi yang kokoh menjadi hal yang urgen. PDM Kota Malang ditopang oleh struktur organisasi di bawahnya yakni pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah. Gerakan sosial Muhammadiyah akan berhasil jika memiliki struktur organisasi yang kuat.” (Wawancara dengan Abd, Ketua PDM Kota Malang, 2020)

Struktur organisasi Persyarikatan Muhammadiyah terdiri dari beberapa tingkatan yang saling terhubung dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakkan nilai-nilai Islam. Di tingkat pusat, terdapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Di bawahnya, terdapat Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) yang mengawasi dan membina cabang-cabang di masing-masing provinsi. Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota, terdapat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) yang berfungsi untuk mengimplementasikan program-program Muhammadiyah. Di tingkat paling dasar, ada ranting, yang merupakan unit terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, memastikan bahwa visi dan misi Muhammadiyah dapat dijalankan secara efektif di seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, dimensi kepemimpinan (*leadership*). Selain dimensi organisasi, hal penting lainnya dalam suatu gerakan sosial adalah aspek kepemimpinan. Sistem kepemimpinan di PDM Kota Malang seperti halnya di Muhammadiyah pada umumnya adalah sistem kolektif kolegial. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan sistem kolektif kolegial yakni suatu sistem dalam sebuah organisasi di mana dalam upaya pencapaian suatu tujuan maka dibutuhkan sebuah koordinasi di antara para pimpinan, antara satu pimpinan dan pimpinan organisasi lainnya. Pengurus PDM Kota Malang berperan sebagai aktor penggerak dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah.

Dinyatakan oleh Brn sebagai berikut:

“Model kepemimpinan di Muhammadiyah itu sifatnya kolektif kolegial dan mengembangkan model kepemimpinan demokratis. Kami para pengurus PDM selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dalam setiap pengambilan keputusan.” (Wawancara dengan Brn, Wakil Ketua PDM Kota Malang, 2020)

Model kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin di Muhammadiyah diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga integritas dan komitmen terhadap visi organisasi. Kepemimpinan di Muhammadiyah bersifat kolektif, di mana keputusan diambil melalui proses diskusi dan musyawarah antara anggota. Selain itu, pemimpin diharapkan mampu menjadi teladan dalam perilaku dan moral, serta aktif dalam pengembangan umat dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah berupaya menciptakan lingkungan yang partisipatif, di mana setiap anggota merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama.

Ketiga, dimensi ideologi (*ideology*). Sebagai suatu gerakan Islam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tajdid yang berbasis kepada Al-Qur'an dan *as-sunnah al-maqbullah*, maka Muhammadiyah memiliki sistem ideologi. Pada dasarnya ideologi Muhammadiyah adalah merupakan sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terdapat tiga aspek ideologi dalam Muhammadiyah, yakni pertama, tentang paham agama dalam Muhammadiyah; kedua, prinsip-prinsip pemikir-

an Muhammadiyah sebagai paradigma; dan ketiga strategi perjuangan menyangkut Muhammadiyah.

Ideologi Persyarikatan Muhammadiyah dalam melakukan gerakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat berakar pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya amal, keadilan, dan kemanusiaan. Muhammadiyah percaya bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan kewajiban kolektif sebagai umat beragama. Dengan prinsip “amal usaha” dan “tajdid,” Muhammadiyah berkomitmen untuk melakukan perubahan sosial yang positif melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Organisasi ini mendorong anggota untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang kurang beruntung. Dalam menjalankan gerakan sosialnya, Muhammadiyah menerapkan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, yang mengedepankan partisipasi masyarakat serta mengedukasi mereka tentang hak dan kewajiban sosial. Dengan demikian, ideologi Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada bantuan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial yang kuat, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Keempat, dimensi partisipasi (*participation*). Dukungan partisipan dari anggota gerakan sosial juga merupakan faktor penentu dinamika dan proses gerakan sosial. Secara nasional organisasi Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki basis massa partisan (anggota) kedua terbesar di Indonesia. Secara nasional diperkirakan jumlah anggota Muhammadiyah tercatat sebanyak sekitar 50 juta. Demikian pula di tingkat lokal, organisasi PDM Kota Malang memiliki jumlah partisan (anggota) kedua terbesar setelah organisasi Islam lainnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Dukungan dan partisipasi warga Muhammadiyah terhadap Persyarikatan sangat signifikan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Anggota Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan, yang merupakan bagian dari program kerja Persyarikatan. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam hal dana, tetapi juga waktu dan tenaga, baik melalui pengelolaan sekolah, rumah sakit, maupun kegiatan dakwah. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga setiap individu merasa terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Selain itu, warga Muhammadiyah juga berperan dalam memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi antaranggota, yang berkontribusi pada pengembangan kapasitas organisasi secara keseluruhan. Dengan semangat gotong royong dan saling mendukung, warga Muhammadiyah berperan aktif dalam memperkuat keberadaan dan pengaruh Persyarikatan di tengah masyarakat.

Kelima, dimensi pengelolaan sumber daya (*resources*). Organisasi gerakan sosial bisa melakukan aktivitas dan proses aksi gerakan sosial jika didukung oleh sumber daya yang dikelola secara efektif. Sumber daya gerakan sosial bisa berupa sumber daya manusia dan nonmanusia, seperti dukungan finansial, fasilitas, peralatan, dan sebagainya. Dalam konteks Muhammadiyah (PDM) sumber daya juga bisa berupa berbagai fasilitas lembaga pelayanan sosial dana mal usaha Muhammadiyah. Berbagai amal usaha yang dimiliki oleh PDM Kota Malang, meliputi: (1) sekolah dasar (SD); (2) madrasah ibtidaiah/diniyah (MI/MD); (3) sekolah menengah pertama (SMP); (4) madrasah sanawiah (MTs); (5) sekolah menengah atas (SMA); (6) sekolah menengah kejuruan (SMK); (7) madrasah aliyah (MA); (8) pondok pesantren; (9) akademi; (10) politeknik; (11) universitas; (12) perguruan tinggi Aisyiyah; (13) sekolah tinggi; (14) rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dll.; (15) panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dll.; (16) panti jompo; (17) rehabilitasi cacat; (18) TK Aisyiyah bustanul athfal; (19) sekolah luar biasa (SLB); (20) masjid; (21) musala; dan (22) tanah.

Keenam, dimensi pengembangan jaringan kerja sama. Dalam upaya optimalisasi proses gerakan kesejahteraan sosial, pengurus PDM Kota Malang membangun dan mengembangkan jaringan kerja sama baik internal maupun eksternal. Jaringan internal dilakukan melalui pemanfaatan hubungan struktural baik vertikal maupun horizontal, seperti dengan PP Muhammadiyah, PWM Jawa Timur, PCM, dan PRM di Kota Malang. Secara horizontal jaringan kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), perguruan tinggi Aisyiyah (PTA), dan sebagainya. Sementara jaringan kerja sama eksternal dilakukan dengan pihak pemerintah, organisasi keagamaan lainnya, pihak LSM, dan sebagainya.

Bentuk aksi sosial (*social action*) yang dilakukan oleh organisasi PDM Kota Malang adalah dalam bentuk gerakan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terorganisir, terencana, dan melembaga, bukan aksi sosial yang sifatnya sesaat dan responsif. Selain itu, implementasi gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh PDM Kota Malang mengadopsi konsep gerakan sosial perspektif teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) sebagaimana dikembangkan oleh Anthony Oberschall.

Selanjutnya, proses gerakan sosial Persyarikatan Muhammadiyah dalam upaya membangun kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan melalui berbagai program yang terintegrasi dan berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Muhammadiyah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, melibatkan anggota dan masyarakat dalam merumuskan solusi untuk masalah sosial yang ada, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui lembaga-lembaga amal dan sosial, seperti rumah sakit Muhammadiyah dan sekolah-sekolah, organisasi ini menyediakan akses layanan yang berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Dengan pendekatan holistik ini, Muhammadiyah berupaya tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan peluang dan memperkuat solidaritas sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini meliputi pertama, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan kesejahteraan sosial telah mengimplementasikan gerakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program layanan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan. Kedua, proses implementasi gerakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan melibatkan aspek-aspek: (1) kekuatan organisasi yang solid; (2) pemimpin yang amanah; (3) spirit dan ideologi nilai-nilai Islam; (4) partisipasi dan dukungan masyarakat; (5) pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel; dan (6) pengembangan jaringan kerja sama baik internal maupun eksternal. Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya PDM Kota Malang, sebagai salah satu bentuk organisasi sosial kemasyarakatan telah turut berperan serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sebaik-

nya pemerintah menyusun program gerakan kesejahteraan sosial yang implementasinya bisa berkolaborasi dengan organisasi gerakan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat, seperti Persyarikatan Muhammadiyah. Kedua, Pemerintah harus memiliki data yang akurat terkait organisasi gerakan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat yang kredibel, akuntabel, dan kapabel, serta memiliki *track record* yang jelas untuk dijadikan partner dalam implementasi program kesejahteraan sosial. Ketiga, Komisi VIII DPR RI harus melakukan pengawasan untuk memastikan agar program pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan secara sistematis, terencana, dan terorganisir, serta berjalan secara efektif dan efisien. Keempat, Komisi VIII DPR RI sebagai lembaga legislasi harus memastikan adanya implementasi atas regulasi formal yang memberikan jaminan keterlibatan aktif organisasi gerakan kesejahteraan sosial masyarakat dalam implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Astri, H. (2013). Pengaturan praktik pekerja sosial profesional di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 155–163. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v4i2.499>
- Austin, M. J., Anthony, E. K., Knee, R. T., & Mathias, J. (2016). Revisiting the relationship between micro and macro social work practice. *Families in Society*, 97(4), 270–277. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.2016.97.33>
- Babbie, E. (2008). *The basics of social research*. Thomson Wadsworth.
- Brieland, D., Costin, L.B., Atherton, C.R. (1975). *Contemporary social work: An introduction to social work and social welfare*. McGraw-Hill Book Company.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of qualitative research*. McGraw-Hill.
- Greene, S. (2002). *Sociology and you*. McGraw-Hill.
- Locher, D. A. (2002). *Collective behavior*. Prentice Hall.
- Macionis, J. J. (2012). *Sociology*. Prentice Hall.
- Marvasti, A.B. (2004). *Qualitative research in sociology: An introduction*. SAGE Publications.
- McBeath, B. (2016). Re-envisioning macro social work practice. *Families in Society*, 97(1), 5–14. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.2016.97.9>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook* (T. R. Rohidi, Trans.; 3rd ed.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, M. (2012). Organisasi masyarakat (ormas) Dompot Dhuafa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(2), 167–177. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v3i2.267>
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of social research: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education, Inc.
- Noble, C. (2015). Social protest movements and social work practice. In *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (2nd ed., pp. 518–524). Elsevier.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>

- Reisch, M. (2016). Why macro practice matters. *Journal of Social Work Education*, 52(3), 258–268. <https://doi.org/10.1080/10437797.2016.1174652>
- Stolley, K. S. (2005). *The basics of sociology*. Greenwood Press.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial*. Intrans Publishing.
- Surya, F. P. (2024). *Peran organisasi masyarakat dalam harmonisasi sosial*. Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/fatihahputrisurya8304/660d09bdc57afb3b0620eea2/peran-organisasi-masyarakat-dalam-harmonisasi-sosial?page=all&page_images=1
- Thompson, N. (2002). Social movements, social justice and social work. *British Journal of Social Work*, 32(6), 711–722. <https://doi.org/10.1093/bjsw/32.6.711>